

Analisis Disparitas Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2024: Pendekatan Indeks Williamson

A'yunin Hafidhatul Ilmi,

Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia
Email: 08010122002@student.uinsby.ac.id

Nurul Lathifah,

Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia
Email: n.lathifah@uinsa.ac.id

Abstrak

Kemiskinan adalah fenomena yang bersifat kompleks dan melibatkan aspek multidimensional. Hal ini disebabkan oleh keterkaitannya dengan berbagai aspek, meliputi aspek sosial, ekonomi, budaya, dan aspek lainnya. Jawa Timur sebagai wilayah terpadat kedua di Indonesia menghadapi masalah kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat disparitas kemiskinan antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur periode 2015–2024 menggunakan pendekatan Indeks Williamson. Data yang digunakan berupa persentase penduduk miskin dan jumlah penduduk dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS). Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan perhitungan Indeks Williamson untuk mengukur ketimpangan antarwilayah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai Indeks Williamson Jawa Timur berada pada kisaran 0,38–0,41 yang dikategorikan sebagai ketimpangan sedang dengan tren meningkat sejak tahun 2018. Peningkatan ini menunjukkan bahwa penurunan kemiskinan tidak sepenuhnya merata di seluruh wilayah provinsi, terutama antara daerah perkotaan seperti Surabaya, Sidoarjo, dan Malang yang memiliki sektor ekonomi maju dengan wilayah pedesaan seperti Madura dan Tapal Kuda yang masih tertinggal secara struktural. Diperlukan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan merata untuk mengurangi disparitas antarwilayah.

Kata Kunci: Kemiskinan, Indeks Williamson, Ketimpangan, Jawa Timur

JEL: I32, O15, R12

Abstract

Poverty is a complex phenomenon involving multidimensional aspects. This is due to its interrelationship with various aspects, including social, economic, cultural, and other aspects. East Java, as the second most populous region in Indonesia, faces poverty issues. This study aims to analyze the level of poverty disparity between districts/cities in East Java Province for the period 2015–2024 using the Williamson Index approach. The data used are the percentage of the poor population and the total population from the official publication of the Central Statistics Agency (BPS). The research method used is descriptive quantitative with the calculation of the Williamson Index to measure inter-regional inequality. The results show that the value of the Williamson Index for East Java is in the range of 0.38–0.41, which is categorized as moderate inequality with an increasing trend since 2018. This increase indicates that poverty reduction is not fully evenly distributed across the province, especially between urban areas such as Surabaya, Sidoarjo, and Malang which have advanced

How to cite: Hafidhatul Ilmi A'yunin, Nurul Lathifah (2025). Analisis Disparitas Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2024: Pendekatan Indeks Williamson. *Independent : Journal Of Economics*, 5(3), 23-32

economic sectors and rural areas such as Madura and Tapal Kuda which are still structurally lagging. More inclusive and equitable development policies are needed to reduce inter-regional disparities.

Keywords: Poverty, Williamson Index, Inequality, East Java

JEL: I32, O15, R12

PENDAHULUAN

Kemiskinan adalah isu global yang menjadi agenda utama dalam pembangunan dunia, termasuk dalam kerangka *Sustainable Development Goals* (SDGs). Kemiskinan adalah masalah multidimensional yang tidak hanya terbatas pada pendapatan rendah, tetapi juga mencakup ketidakmampuan untuk mengakses kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan sanitasi yang layak (Nopiah et al., 2020). Kemiskinan menjadi salah satu permasalahan fundamental dalam proses pembangunan nasional sebuah negara. kondisi ini menjadikannya sebagai tolak ukur utama keberhasilan pembangunan. Keberhasilan tersebut diukur berdasarkan tingkat kemampuan dalam mengendalikan dan mereduksi angka kemiskinan secara signifikan dan berkala, dengan tujuan pada pencapaian pemerataan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat.

Pemerintah Indonesia telah menginisiasi dan melaksanakan berbagai program intervensi yang ditujukan untuk pengentasan kemiskinan, namun implementasinya kerap menemui hambatan. Akibatnya, meskipun program-program tersebut mampu menurunkan persentase tingkat kemiskinan, secara absolut jumlah penduduk miskin masih berada pada tingkat yang tinggi (Arifin, 2020). Indonesia merupakan negara kepulauan yang secara administratif terbagi menjadi 38 provinsi. Jawa Timur menduduki posisi sebagai provinsi terluas di Pulau Jawa dan menempati posisi kedua dalam hal kepadatan penduduk secara nasional. Provinsi ini dihadapkan pada berbagai masalah ekonomi, termasuk isu kemiskinan. Berdasarkan tingkat kemiskinan, Jawa Timur menempati urutan ketiga sebagai provinsi dengan angka kemiskinan tertinggi di Pulau Jawa setelah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah (Putri & Pratiwi, 2024).

Meskipun Provinsi Jawa Timur menempati posisi ketiga terendah dalam persentase penduduk miskin di Pulau Jawa, data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistika (BPS) menunjukkan bahwa Provinsi ini menempati peringkat tertinggi di Indonesia dalam jumlah penduduk miskin, yakni mencapai 3.893,82 ribu jiwa. Urutan berikutnya ditempati oleh Jawa Barat dengan 3.668,35 ribu jiwa dan Jawa Tengah dengan 3.893,34 ribu jiwa. Dengan demikian, meskipun persentase kemiskinan di Jawa Timur tergolong relatif rendah, secara nominal jumlah penduduk miskin tetap merupakan yang tertinggi apabila dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Jawa, meliputi Jawa Barat dan Jawa Tengah. Faktor-faktor ekonomi, sosial, dan ketersediaan infrastruktur memiliki efek signifikan terhadap kesejahteraan di Jawa Timur, yang secara tidak langsung berkorelasi dengan tingkat kemiskinan (Nopiah et al., 2020).

Tabel 1. Persentase Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2024

Tahun	Persentase Penduduk Miskin (Persen)
2015	12,34
2016	12,05
2017	11,77
2018	10,98
2019	10,37
2020	11,09
2021	11,40
2022	10,38
2023	10,35
2024	9,79

Sumber: BPS (telah diolah), 2025

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa persentase tingkat kemiskinan di Jawa Timur mengalami tren penurunan yang konsisten selama satu dekade terakhir. Pada tahun 2015, persentase penduduk miskin tercatat sebesar 12,34%, dan terus menurun hingga mencapai 9,79% pada tahun 2024. Penurunan tersebut mencerminkan adanya perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat, khususnya pasca pandemi Covid-19. Namun, laju penurunan kemiskinan cenderung melambat sejak tahun 2020, yang menunjukkan bahwa upaya pengentasan kemiskinan mulai menghadapi tantangan struktural, seperti ketimpangan distribusi pendapatan, keterbatasan akses pendidikan, dan kesenjangan antar wilayah (Aini & Nugroho, 2023). Pemerataan hasil pembangunan di Jawa Timur belum sepenuhnya tercapai dan masih terdapat kelompok masyarakat yang rentan terhadap kemiskinan.

Tabel 2. Jumlah Penduduk di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2024

Tahun	Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa)
2015	38.847.561
2016	39.075.152
2017	39.292.971
2018	39.500.851
2019	39.698.631
2020	40.665.696
2021	40.878.789
2022	41.149.974
2023	41.416.407
2024	41.714.928

Sumber: BPS (telah diolah), 2025

Selaras dengan penurunan tingkat kemiskinan, sebaliknya jumlah penduduk Jawa Timur menunjukkan tren peningkatan dari 38,85 juta jiwa pada tahun 2015 menjadi 41,71 juta jiwa pada tahun 2024. Pertumbuhan jumlah penduduk Jawa Timur yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya berpotensi menimbulkan permasalahan sosial, khususnya kemiskinan. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur perlu merumuskan dan mengimplementasikan strategi yang efektif dan komprehensif untuk menekan laju pertumbuhan penduduk (Ristika et al., 2021). Apabila pertumbuhan penduduk tidak dapat dikendalikan secara efektif, hal tersebut berpotensi menghambat pencapaian tujuan pembangunan ekonomi, meliputi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan tingkat kemiskinan. Secara matematis, pertumbuhan jumlah penduduk juga menjadi faktor penimbang dalam perhitungan Indeks Williamson, sehingga wilayah dengan populasi besar seperti Surabaya, Sidoarjo, dan Malang memiliki kontribusi yang lebih dominan terhadap ketimpangan regional dibandingkan dengan wilayah jumlah penduduk lebih sedikit, seperti Madura.

Penelitian terkait disparitas dengan Indeks Williamson telah dilakukan sebelumnya. Penelitian oleh Ananda & Prabowo (2021) menganalisis disparitas pendapatan di Provinsi Jawa Timur periode 2011-2019 menggunakan Indeks Williamson dan menemukan nilai indeks yang sangat tinggi yaitu di atas 0,9 dengan tren kenaikan setiap tahun. Nilai Indeks Williamson antar desa di Kecamatan Sidayu sebesar 0,62-0,72 (kategori sedang) penelitian oleh Perdana & Yasin (2025). Disparitas kemiskinan perdesaan dan perkotaan di Jawa Timur dengan selisih 6-8% (Kustanto & Sholihah, 2020). Disparitas antara provinsi dengan nilai Gini Index di beberapa wilayah timur Indonesia mencapai $>0,40\%$ yang termasuk kategori sedang-tinggi (Marantika et al., 2018). Karakteristik wilayah perkotaan dan sektor unggulan juga memiliki peran penting dalam membentuk pola disparitas. Fitriyah & Prabowo (2021) mengidentifikasi ketimpangan distribusi pendapatan antarkota di wilayah Jawa Timur selama kurun waktu 2010-2019 dengan rerata Indeks Williamson sebesar 0,8 yang dikategorikan dalam tingkat ketimpangan sangat tinggi. Penelitian tersebut mengidentifikasi bahwa hanya 3 dari 9 kota termasuk kategori daerah maju (Surabaya, Batu, dan Madiun), sedangkan 4 kota lainnya masih tertinggal dengan ketimpangan yang cenderung meningkat.

Penelitian terdahulu lebih banyak berfokus pada disparitas pendapatan antar desa (Perdana & Yasin, 2025), kesenjangan perdesaan-perkotaan (Kustanto & Sholihah, 2020), atau disparitas antar provinsi (Marantika et al., 2018). Ananda & Prabowo (2021) dan Fitriyah & Prabowo (2021) telah menganalisis disparitas di Jawa Timur menggunakan Indeks Williamson dengan fokus pada pendapatan perkapita berbasis PDRB periode 2011-2019 dan 2010-2019. Namun, penelitian mengenai disparitas kemiskinan di Jawa Timur dengan menggunakan Indeks Williamson pada periode terbaru belum banyak dilakukan. Penelitian ini menghadirkan kebaruan dengan menyajikan analisis empiris mengenai disparitas tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur menggunakan pendekatan Indeks Williamson Tahun 2015-2024.

Pemilihan Provinsi Jawa Timur sebagai lokasi penelitian didasarkan pada fakta bahwa provinsi ini memiliki 38 kabupaten/kota dengan karakteristik wilayah yang sangat heterogen dari sisi ekonomi, sosial, dan infrastruktur. Provinsi ini merupakan salah satu wilayah dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia dan

memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Meskipun kemiskinan secara persentase di Jawa Timur menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir, peningkatan jumlah penduduk berpotensi memperlebar kesenjangan perekonomian antarwilayah apabila pertumbuhan ekonomi tidak merata. Kota besar seperti Surabaya, Malang, dan Sidoarjo memiliki tingkat kemiskinan yang relatif rendah, sedangkan beberapa Kabupaten di Madura dan daerah lain masih menghadapi tingkat kemiskinan yang tinggi. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik meneliti tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur pada periode 2015-2024 dengan menggunakan pendekatan Indeks Williamson.

METODE PENELITIAN

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif. Pemilihan pendekatan kuantitatif didasarkan pada tujuan utama penelitian, yaitu menganalisis dan mengukur besaran disparitas kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Pengukuran ini dilakukan melalui data numerik dan model matematis, yaitu Indeks Williamson. Metode deskriptif bertujuan untuk menyajikan deskripsi yang sistematis, faktual, dan akurat terkait fakta-fakta serta korelasi antar variabel. pemilihan Jawa Timur sebagai lokasi penelitian dilatarbelakangi oleh karakteristiknya sebagai provinsi dengan jumlah penduduk miskin tertinggi di Indonesia. Data yang dianalisis adalah data sekunder dengan rentan waktu sepuluh tahun, yaitu periode 2015-2024. Sumber data tersebut diekstrasi dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur. Variabel utama dalam penelitian ini meliputi Persentase penduduk miskin dan jumlah total penduduk di setiap kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.

Pengolahan data dalam studi ini memanfaatkan Indeks Williamson (IW) sebagai alat analisis. Indeks Williamson (IW), yang dikembangkan oleh Jeffrey G. Williamson pada tahun 1965, adalah salah satu alat ukur paling umum untuk menganalisis disparitas regional, termasuk dalam konteks kemiskinan. Indeks Williamson digunakan untuk mengukur tingkat ketidakmerataan pembangunan ekonomi regional dengan memperhitungkan kontribusi populasi dari masing-masing wilayah (Williamson, 1965). Indeks ini mengukur tingkat disparitas kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Rumus matematis yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan untuk mengukur disparitas tingkat kemiskinan, sebagai berikut:

$$IW = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})^2 \times \left(\frac{f_i}{m}\right)}{\bar{Y}^2}}$$

(1)

Di mana:

IW = Indeks Williamson

n = Jumlah kabupaten/kota di Jawa Timur

Y_i = Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota ke-i

\bar{Y} = Rata-rata tingkat kemiskinan di seluruh kabupaten/kota

f_i = Jumlah penduduk total di kabupaten/kota ke-i

m = Jumlah penduduk total kabupaten/kota

Penafsiran nilai Indeks Williamson diinterpretasikan sebagai berikut:

- a. $IW < 0,35$ menunjukkan tingkat kesenjangan rendah
- b. $0,35 < IW > 0,5$ menunjukkan tingkat kesenjangan sedang
- c. $IW > 0,5$ menunjukkan tingkat kesenjangan tinggi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam kurun waktu satu dekade terakhir, disparitas tingkat kemiskinan antarkabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur menunjukkan tren peningkatan, walaupun perubahan tersebut berlangsung secara relatif konstan setiap tahunnya. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa penurunan angka kemiskinan belum berlangsung merata di seluruh wilayah provinsi. Ketimpangan kemiskinan antar daerah di Provinsi Jawa Timur dapat diukur dengan menggunakan Indeks Williamson. Indeks ini dihitung berdasarkan variasi persentase penduduk miskin dengan mempertimbangkan jumlah penduduk di Provinsi Jawa Timur sebagai faktor penimbang, sehingga dapat menghasilkan nilai indeks di setiap tahunnya. Selama periode 2015-2024 perhitungan Indeks Williamson memperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Indeks Williamson Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024

Tahun	Nilai Indeks Williamson	Kategori
2015	0,39	Sedang
2016	0,38	Sedang
2017	0,38	Sedang
2018	0,39	Sedang
2019	0,40	Sedang
2020	0,39	Sedang
2021	0,39	Sedang
2022	0,39	Sedang
2023	0,40	Sedang
2024	0,41	Sedang

Sumber: BPS (telah diolah), 2025

Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai Indeks Williamson di Provinsi Jawa Timur selama periode 2015-2024, diperoleh nilai yang konsisten, berada pada kisaran 0,38-0,41. Nilai ini menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tergolong sedang. Nilai indeks sempat

menurun menjadi 0,38 pada tahun 2016-2017, menunjukkan adanya penurunan disparitas ekonomi antardaerah. Namun, pada tahun 2018 nilai indeks kembali mengalami peningkatan bertahap hingga mencapai 0,41 pada tahun 2024, yang berarti disparitas kemiskinan antarwilayah mulai melebar. Peningkatan ini menunjukkan bahwa lemahnya distribusi pendapatan dan pembangunan ekonomi yang belum sepenuhnya merata, di wilayah perkotaan seperti Surabaya, Sidoarjo, dan Malang tumbuh lebih cepat dibandingkan wilayah pedesaan seperti Madura.

Temuan nilai Indeks Williamson pada penelitian ini (0,38-0,41) menunjukkan pola yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Ananda & Prabowo (2021) menemukan nilai Indeks Williamson yang jauh lebih tinggi yaitu di atas 0,9 untuk periode 2011-2019 ketika mengukur disparitas pendapatan berbasis PDRB per kapita. Perbedaan signifikan ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan ekonomi (PDRB per kapita) jauh lebih tinggi dibandingkan ketimpangan kemiskinan. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun terdapat kesenjangan besar dalam pendapatan antarwilayah, distribusi kemiskinan relatif lebih merata. Namun, tren peningkatan disparitas yang ditemukan pada kedua penelitian menunjukkan pola yang konsisten, dimana kesenjangan antarwilayah di Jawa Timur cenderung melebar dari waktu ke waktu.

Teori Ketimpangan Pembangunan oleh Jeffrey G. Williamson (1965), yang menjelaskan bahwa ketimpangan antarwilayah timbul akibat perbedaan tingkat industrialisasi, urbanisasi, dan konsentrasi kegiatan ekonomi. Dalam konteks Jawa Timur, wilayah perkotaan seperti Surabaya, Sidoarjo, dan Malang berperan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dengan sektor industri, perdagangan dan pariwisata. Sedangkan wilayah pedesaan seperti Madura dan Tapal Kuda masih bergantung pada sektor pertanian dengan produktivitas yang relatif rendah. Ketimpangan struktur ekonomi ini mengakibatkan melemahnya kesejahteraan antarwilayah dan memperlambat penurunan tingkat kemiskinan.

Disparitas kemiskinan yang terjadi di Jawa Timur tidak dapat dilepaskan dari perbedaan karakteristik sektor ekonomi dominan di setiap wilayah. Fitriyah & Prabowo (2021) mengidentifikasi bahwa wilayah perkotaan seperti Surabaya, Batu, dan Madiun yang termasuk kategori daerah maju memiliki sektor basis pada industri, perdagangan, informasi dan komunikasi, serta jasa dengan nilai *Location Quotient* (LQ) yang tinggi. Sebaliknya, wilayah tertinggal seperti beberapa kabupaten di Madura masih bergantung pada sektor pertanian tradisional dengan produktivitas rendah.

Penelitian terdahulu oleh (Nugraha & Prayitno, 2020) yang menunjukkan bahwa perbedaan tingkat pembangunan dan urbanisasi menjadi faktor utama ketimpangan wilayah antara daerah maju dan tertinggal di Indonesia. Selanjutnya, penelitian oleh (Alawiyah et al., 2020) menunjukkan bahwa disparitas pembangunan dan kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan perekonomian di tingkat regional. Dengan demikian, peningkatan nilai Indeks Williamson di Jawa Timur menggambarkan belum meratanya pembangunan dan distribusi kesejahteraan antarwilayah, yang berdampak langsung terhadap perbedaan tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.

Temuan penelitian ini selaras dengan teori klasik pembangunan ekonomi yang dikemukakan oleh Simon Kuznets (1955). Teori tersebut menyatakan adanya hubungan korelasi antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat ketimpangan pembangunan regional, dimana korelasi tersebut membentuk kurva "U" terbalik (*inverted U-curve*). Pada fase awal pembangunan, pertumbuhan ekonomi cenderung terkosentrasi pada wilayah-wilayah yang telah berkembang sebagai dampak dari proses industrialisasi, sehingga mengakibatkan distribusi pendapatan tidak merata dan berpotensi menghambat laju penurunan tingkat kemiskinan (Aini & Nugroho, 2023). Penelitian oleh Ristika et al. (2021) memperkuat argumen bahwa pertumbuhan jumlah penduduk yang tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penyediaan lapangan kerja yang memadai dapat mempersebar disparitas kemiskinan antarwilayah, terutama di wilayah yang memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan dan kesehatan berkualitas seperti yang terjadi di Madura dan wilayah Tapal Kuda.

Penelitian oleh Nopiah et al. (2020) mengungkapkan bahwa penurunan ketimpangan sosial-ekonomi memiliki dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, peningkatan nilai Indeks Williamson yang menunjukkan tren melebar sejak tahun 2018 mengindikasikan bahwa meskipun terjadi penurunan persentase kemiskinan secara agregat, kesenjangan antarwilayah justru semakin melebar, yang berpotensi menghambat upaya peningkatan kesejahteraan secara merata di seluruh wilayah Jawa Timur. Faktor penyebab kemiskinan di perkotaan dan pedesaan memiliki karakteristik yang berbeda. Kemiskinan perkotaan lebih dipengaruhi oleh tingginya biaya hidup dan persaingan kerja yang ketat, sedangkan kemiskinan pedesaan lebih disebabkan oleh keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur (Istyawan, 2025).

Kondisi Jawa Timur menunjukkan bahwa daerah dengan tingkat industrialisasi dan urbanisasi tinggi, seperti Surabaya dan Malang, mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dibandingkan wilayah pedesaan seperti Madura. Fenomena ini menggambarkan fase menanjak dari kurva Kuznets, di mana pertumbuhan belum sepenuhnya inklusif. Namun, Ananda & Prabowo (2021) menemukan bahwa meskipun terdapat hubungan kuat negatif antara pertumbuhan ekonomi dan disparitas pendapatan di Jawa Timur periode 2011-2019, hipotesis Kuznets tidak sepenuhnya terbukti karena kurva yang terbentuk tidak membentuk huruf U terbalik. Hal ini mengindikasikan bahwa pola hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan di Jawa Timur lebih kompleks dan memerlukan intervensi kebijakan yang lebih strategis untuk mencapai fase penurunan ketimpangan.

KESIMPULAN

Disparitas kemiskinan di Provinsi Jawa Timur selama periode 2015-2024 menunjukkan tren penurunan tingkat kemiskinan. Nilai Indeks Williamson yang berkisar antara 0,38-0,41 menunjukkan bahwa ketimpangan tingkat kemiskinan berada pada kategori sedang, dengan kecenderungan meningkat kembali setelah tahun 2018. Peningkatan ini menunjukkan bahwa penurunan kemiskinan tidak sepenuhnya merata di seluruh wilayah provinsi, terutama antara daerah perkotaan seperti Surabaya, Sidoarjo, dan Malang yang memiliki sektor ekonomi maju dengan wilayah

pedesaan seperti Madura dan Tapal Kuda yang masih tertinggal secara struktural. Penelitian ini memperkuat Teori Ketimpangan Pembangunan Williamson (1965) dan Teori Kuznets (1955) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang diinginkan di wilayah maju pada tahap awal pembangunan cenderung meningkatkan penurunan antarwilayah sebelum akhirnya menurun pada fase pembangunan yang lebih merata.

Meskipun hasil penelitian ini telah memberikan gambaran yang komprehensif mengenai disparitas kemiskinan antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, penelitian ini memiliki keterbatasan. Pertama, pendekatan menggunakan Indeks Williamson hanya mengukur ketimpangan secara agregat, sehingga hasil yang diperoleh menunjukkan tingkat ketimpangan secara umum tanpa menjelaskan dinamika sosial-ekonomi yang mencakup perbedaan antarwilayah. Kedua, penelitian ini belum melakukan identifikasi faktor-faktor penyebab ketimpangan kemiskinan antarwilayah di Provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu, hasil penelitian ini lebih menekankan pada pemetaan tingkat disparitas kemiskinan antarwilayah, bukan pada analisis yang menentukan faktor penyebab kemiskinan.

Kebaruan penelitian ini terletak pada penerapan Indeks Williamson berdasarkan persentase penduduk miskin dan jumlah penduduk sebagai alat ukur disparitas kemiskinan antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur dalam rentang waktu 2015–2024 . Pendekatan ini memberikan perspektif baru dalam studi ketimpangan, karena selama ini sebagian besar penelitian di Indonesia lebih menitikberatkan pada ketimpangan ekonomi berbasis PDRB per kapita . Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi empiris terhadap perluasan metodologi pengukuran kesenjangan sosial-ekonomi dan menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan berbasis pemerataan wilayah .

REFERENSI

- Aini, S. N., & Nugroho, R. Y. Y. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan, Pengangguran, dan Ketimpangan Pendapatan Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. *BuletinEkonomika Pembangunan*, 4(1).
- Alawiyah, K., Fitrawaty, & Manulang, R. (2020). Analysis of Economic Inequality in Indonesia. *4th Padang International Conference on Education, Economics, Business and Accounting (PICEEBA-2 2019) Analysis*, 124, 391–397.
- Ananda, A. R. O. R., & Prabowo, P. S. (2021). Analisis Disparitas Pendapatan Dan Pengujian Hipotesis Kuznet Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2019. *Independent: Journal of Economics*, 1(2), 196–205.
<https://doi.org/10.26740/independent.v1n2.p196-205>
- Arifin, J. (2020). Budaya Kemiskinan Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia. *Sosio Informa*, 6(02), 114–132.
- Fitriyah, L., & Prabowo, P. S. (2021). Analisis Ketimpangan Pendapatan Dan Pengembangan Sektor Unggulan Wilayah Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2019. *INDEPENDENT : Journal Of Economics*, 1, 206–216.

- Istyawan, A. (2025). Kemiskinan Perdesaan dan Perkotaan: Sebuah Literature Review. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 5(2), 973–986. <https://doi.org/10.37481/jmh.v5i2.1365>
- Kustanto, M., & Sholihah, F. (2020). Reserve Brain Drain sebagai Alternatif Mengatasi Kemiskinan. *Jurnal Litbang: Media Informasi Penelitian, Pengembangan dan IPTEK*, 16(1), 63–76. <https://doi.org/10.33658/jl.v16i1.164>
- Kuznets, S. (1955). Economic growth and income inequality. In *The gap between rich and poor*. In *In The gap between rich and poor* (1 st Editi, hal. 25–37). <https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9780429311208-4/economic-growth-income-inequality-simon-kuznets>
- Marantika, D., Hadi P. T., & Viphindrartin, S. (2018). Disparitas Regional Antar Provinsi Di Indonesia 2011 – 2015 (Model Regresi Spasial). *Media Trend*, 13(1), 31. <https://doi.org/10.21107/mediatrend.v13i1.3171>
- Nopiah, R. N., Rosyadi, H., & Abdurakhman. (2020). Explaining the Fall of Socio-Economic Inequality on Welfare in East Java: A Household Level Analysis. *East Java Economic Journal*, 4(1), 56–72. <https://doi.org/10.53572/ejavec.v4i1.9>
- Nugraha, A. T., & Prayitno, G. (2020). Regional Disparity in Western and Eastern Indonesia. *International Journal of Economics and Business Administration*, VIII(4), 101–110.
- Perdana, M. A., & Yasin, M. (2025). Analisis Disparitas Pendapatan Antar Desa di Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik Tahun 2014-2023. *Jurnal Nirta : Studi Inovasi*, 5(1), 263–269.
- Putri, D. L., & Pratiwi, I. E. (2024). *Daftar Provinsi Paling Miskin di Jawa 2024, DIY Urutan Teratas*. kompas.com. https://www.kompas.com/tren/read/2024/07/04/133000765/daftar-provinsi-paling-miskin-di-jawa-2024-diy-urutan-teratas?lgn_method=google&google_btn=onetap&page=all#google_vignette
- Ristikka, E. D., Primandhana, W. P., & Wahed, M. (2021). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 12(November), 129–136. <https://doi.org/10.33087/eksis.v12i2.254>
- Williamson, J. G. (1965). Regional inequality and the process of national development: a description of the patterns. In *Economic development and cultural change*, (hal. 1–84).